

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan atas kehadiran Allah SWT, Karena berkat Rahmat dan Hidayah-Nyalah sehingga penyusunan Ranwal Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2023 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dapat diselesaikan dengan tepat waktu.

Renja adalah Dokumen Perencanaan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) untuk periode 1 tahun. Renja memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi BKPSDM, yang disusun berpedoman kepada Renstra BKPSDM dan RKPD sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Melalui penyusunan Ranwal Renja ini sangat diharapkan dapat menjadi sebuah acuan dan pedoman dalam pelaksanaan program kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Luwu Timur dalam rangka peningkatan kinerja BKPSDM serta dapat menjadi sebuah umpan balik dalam penetapan Keputusan dan kebijakan dalam penyusunan perencanaan oleh pimpinan dan seluruh jajaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kab. Luwu Timur dimasa yang akan datang.

Semoga penyusunan ranwal Renja Ini dapat bermanfaat serta dapat menjadi suatu pedoman dalam penyusunan perencanaan dalam menjalankan tugas dan fungsi BKPSDM dalam rangka upaya mencapai visi dan misi Kabupaten Luwu Timur.

Malili, Juli 2022

Kepala BKPSDM,



**Dra. ROSMIYATI ALWY, MM**

Pangkat: Pembina Utama Muda  
NIP. 19650110 198602 2 004

**DAFTAR ISI**

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR TABEL .....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan .....	3
1.4. Sistematika Penulisan .....	4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.....	6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan BKPSDM.....	20
2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BKPSDM Kabupaten Luwu Timur 27	
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	30
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	42
3.1 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja BKPSDM Kab. Luwu Timur.....	42
BAB IV .....	61
PENUTUP .....	61

**DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja BKPSDM dan Pencapaian Renstra BKPSDM s/d Tahun 2021 Kab. Luwu Timur .....	8
Tabel 2.2.1	Indikator Kinerja Utama (IKU) BKPSDM .....	20
Tabel 2.2.2	Indikator Kinerja Kunci (IKK) BKPSDM .....	21
Tabel 2.2.3	Pencapaian Kinerja Pelayanan BKPSDM .....	22
Tabel 2.2.4	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan .....	25
Tabel 2.2.5	Jumlah Pegawai Non PNS berdasarkan Kualifikasi Pendidikan .....	25
Tabel 2.2.6	Jumlah Pegawai BKPSDM berdasarkan Pangkat dan Golongan .....	26
Tabel 2.2.7	Jumlah Pegawai BKPSDM berdasarkan Jabatan Struktural .....	26
Tabel 2.2.8	Jumlah Pegawai BKPSDM berdasarkan Jabatan Fungsional .....	27
Tabel 2.4.1	Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 BKPSDM .....	30
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Renja BKPSDM Kab. Luwu Timur Tahun 2023.....	43
Tabel 3.2	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan BKPSDM Tahun 2021 .....	44

## DAFTAR GAMBAR

Tabel 2.1	Bagan Struktur Organisasi BKPSDM Tahun 2023 .....	24
-----------	---	----

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Penyusunan Rencana Kerja (BKPSDM) diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam hal ini Perencanaan merupakan suatu proses untuk menentukan Tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan tetap memperhatikan sumber daya manusia yang tersedia.

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka Panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan Daerah.

Dalam undang-undang ini mengharuskan untuk setiap Daerah untuk Menyusun perencanaan pembangunan jangka Panjang yang disingkat (RPJP) untuk periode 20 Tahun, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode 5 Tahun serta Rencana Kerja (RENJA) untuk periode 1 Tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra OPD kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Renja OPD merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan OPD khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya. Renja OPD memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja OPD merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil. Keterkaitan antara Renja OPD dengan dokumen perencanaan lain seperti RKPD dan Renstra OPD sangat erat dan tidak dapat dipisahkan karena Renja OPD merupakan penjabaran dari Dokumen Perencanaan yang ada di atasnya seperti RKPD, Rensta OPD dan RPJMD. Renja OPD disusun oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Renja digunakan sebagai dasar penyusunan rencana Kerja Anggaran (RKA) perangkat daerah untuk menyusun Anggaran Belanja Penapatan Daerah (APBD).

## 1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan dan penetapan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4277);
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahaan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencanan Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Dan Penganggaran Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten

- Luwu Timur Tahun 2012 Nomor 10, Tambahna Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 70);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 02 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 3);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 04 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 4);
  9. Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 50 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Luwu Timur; dan
  10. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 50 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Luwu Timur;

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Rencana Kerja Tahun 2023 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Luwu Timur adalah:

1. Untuk memenuhi kebutuhan akan adanya dokumen perencanaan tahunan yang menjadi acuan dalam penyusunan program dan kegiatan,
2. Sebagai tolok ukur penilaian kinerja serta sebagai perangkat untuk mencapai harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bagi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2023.

Adapun tujuan Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2023 pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah:

1. Sebagai pedoman dalam menentukan prioritas program dan kegiatan Tahun 2023;
2. Memudahkan seluruh jajaran aparatur BKPSDM dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi;

3. Memudahkan seluruh jajaran aparatur BKPSDM untuk memahami arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional Tahun 2023.
4. Sebagai dokumen pelaksanaan program dan kegiatan yang berpedoman pada RKPD Kab. Luwu Timur Tahun 2023.
5. Sebagai acuan BKPSDM dalam melaksanakan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BKPSDM;
6. Menjaga kontinuitas kegiatan dan proses pembangunan agar selaras dengan program tahunan daerah;
7. Sebagai alat kontrol organisasi dalam mengendalikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan tahunan;
8. Sebagai acuan dalam melaksanakan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan;

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Rencana Kerja Tahun 2023 Badan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Luwu Timur mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, disusun sebagai berikut:

### **BAB I            PENDAHULUAN**

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan Renja.

#### **1.1        Latar Belakang**

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renja, Proses penyusunan Renja SKPD, keterkaitan Renja SKPD dengan Dokumen RKPD, Renstra SKPD, dengan Renja dengan proses penyusunan RAPBD.

#### **1.2        Landasan Hukum**

Menguraikan apa yang menjadi landasan hukum di dalam penyusunan Renja BKPSDM Tahun 2023.

#### **1.3        Maksud dan Tujuan**

Memuat Penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja BKPSDM.



#### 1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD serta susunan garis besar isi dokumen.

### BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu dan Capaian Renstra SKPD

2.2 Analisis Kerja Pelayanan BKPSDM

2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BKD

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

### BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menguraikan tentang telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran renja perangkat daerah, serta program dan kegiatan.

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja

3.3 Program dan Kegiatan

### BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menguraikan rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah pada tahun rencana.

### BAB V PENUTUP

5.1 Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.

5.2 Kaidah – kaidah pelaksanaan

5.3 Rencana Tindak lanjut

## **BAB II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

Capaian pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dituangkan dalam Rencana Kerja dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan. Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara lengkap tentang pencapaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam pelaksanaan APBD. Kinerja sendiri dapat dijelaskan sebagai keluaran/hasil dari program kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.

Untuk mengukur kinerja diperlukan indikator kinerja yang merupakan alat ukur untuk pencapaian suatu kebijakan/program/ kegiatan dan sekaligus merupakan laporan pertanggungjawaban keuangan yang berbentuk laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan catatan atas Laporan Keuangan. Ketentuan mengenai bentuk laporan keuangan tersebut diatur dalam PP Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dalam Konsep ini diperlukan indikator input (masukan), output (keluaran) dan outcome (hasil). Secara rinci indikator-indikator tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Indikator masukan (input) yaitu indikator yang menggambarkan segala sesuatu yang dibutuhkan baik berupa sumber dana, sumber daya alam, sumber daya manusia maupun berupa teknologi dan informasi agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran.
2. Indikator keluaran (output) yaitu indikator yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan berupa fisik maupun berupa non fisik.
3. Indikator hasil (outcome) yaitu indikator yang menunjukkan telah dicapainya maksud dan tujuan dari kegiatan-kegiatan yang telah selesai dilaksanakan atau indikator yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah.

Laporan kinerja dapat dilihat dari 2 (Dua) hal yaitu **pencapaian kinerja output** dan **kinerja keuangannya**.

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Dalam Kegiatan evaluasi capaian hasil pelaksanaan Rencana Kerja Badan Kepegawaian, Pengembangan dan Sumber Daya Manusia adalah merupakan sebuah cara

untuk mengidentifikasi kemampuan BKPSDM dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi capaian kinerja program dan kegiatan Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Gambaran Pencapaian pelaksanaan Program dan Kegiatan memenuhi target secara maksimal ataupun tidak dapat tergambarkan melalui laporan kinerja dan laporan keuangan. Laporan Kinerja merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD.

RKPD Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2023 merupakan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026. Sebagai upaya dalam memaksimalkan capaian Program dan Kegiatan tahun 2023 sangat perlu dilakukan evaluasi terhadap capaian program dan kegiatan tahun sebelumnya.

Pada tahun 2021 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia melaksanakan 3 Program, 14 Kegiatan dan 42 Sub Kegiatan dengan realisasi anggaran sebesar Rp11.655.050.271,- atau sebesar 95,41% dari anggaran sebesar Rp12.215.272.305,-

Adapun Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Luwu Timur dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022  
Kabupaten Luwu Timur

Nama SKPD: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Lembar: .....

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 (Tahun (n-3))	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021 (n-2)			Target Program dan Kegiatan 2022 (Renja SKPD) Tahun n-1	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun berjalan	
					Target Renja SKPD Tahun 2021 (Tahun n-2)	Realisasi Renja SKPD Tahun 2021 (Tahun n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	$8 = \frac{7}{6} * 100$	9	$10 = (5+7+9)$	$11 = \frac{10}{4} * 100$
5.03.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									
5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu	100 %		100%	100%	100%	100%	100%	

RENCANA KERJA (RENJA) 2023 BKPSDM

5.03.01.2.0 1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Yang disusun Tepat Waktu	2 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	100%	7 Dok	7 Dok	
5.03.01.2.0 1.2	Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD yang disusun tepat waktu	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dok	2 Dok	
5.03.01.2.0 1.4	Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA -SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD yang disusun tepat waktu	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dok	2 Dok	
5.03.01.2.0 1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah yang disusun	10 Dokumen		10 Dokumen	10 Dokumen	100%	10 Dok	10 Dok	
<b>5.03.01.2.02</b>	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik	100%		100%	81%	81%	95%	96%	
5.03.01.2.0 2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangannya terbayarkan	34 Orang		34 Orang	24 Orang	70,58%	28 Orang	26 Orang	
5.03.01.2.0 2.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD yang disusun Tepat Waktu	7 Dokumen		15 Laporan	15 Laporan	100%	13 Dokumen	13 Dok	
<b>5.03.01.2.03</b>	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang diadministrasikan sesuai standar	100%		100%	100%	100%	100%	100%	

RENCANA KERJA (RENJA) 2023 BKPSDM

5.03.01.2.0 3.6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD yang disusun	1 Dokumen		4 Laporan	1 Laporan	100%	4 Dokumen	4 Dok	
5.03.01.2.0 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Rara-rata Capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%		100%	100%	100%	100%	92%	
5.03.01.2.0 5.3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Data Administrasi Kepegawaian yang dimutakhirkan	1 Laporan		-	-	-	4 Laporan	4 Laporan	
5.03.01.2.0 5.9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang Lulus Diklat berdasarkan TUSI	5 Orang		3 Orang	3 Orang	100%	9 Orang	9 Orang	
5.03.01.2.0 5.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	4 Orang		-	-	-	-	-	
5.03.01.2.0 5.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	5 Orang	100%	3 Orang	3 Orang	100%	13 Orang	10 Orang	
5.03.01.2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja administrasi umum	95%		100%	103%	103%	95%	100%	

		Perangkat Daerah								
5.03.01.2.0 6.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang di sediakan	7 Jenis	100%	6 Jenis	7 Jenis	100%	7 Jenis	7 Jenis	
5.03.01.2.0 6.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	20 Unit		39 Unit	39 Unit	100%	19 Unit	19 Unit	
5.03.01.2.0 6.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	20 Jenis		21 Jenis	21 Jenis	100%	21 Jenis	21 Jenis	
5.03.01.2.0 6.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan/atau penggandaan yang disediakan	3 Jenis	100%	3 Jenis	3 Jenis	100%	3 Jenis	3 Jenis	
5.03.01.2.0 6.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	48 Eksamplar	100%	48 Eksamplar	48 Eksamplar	100%	48 Eksamplar	48 Eksamplar	
5.03.01.2.0 6.8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi	650 Orang		790 Orang	1.045 Orang	132,28%	1041 Orang	1041 Orang	
5.03.01.2.0 6.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diikuti	140 Kali		218 Kali	195 Kali	89,45%	341 Kali	341 Kali	

RENCANA KERJA (RENJA) 2023 BKPSDM

5.03.01.2.0 6.10	Penata usahaan arsip dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen		-			1 Dokumen	1 Dokumen	
5.03.01.2.0 7	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Persentase BMD-PD Penunjang yang terpenuhi	100%		100 %	50%	50%	100%	100%	
5.03.01.2.0 7.1	Pengadaan kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang diadakan	1 Unit		-	-	-	-	-	
5.03.01.2.0 7.5	Pengadaan mebel	Jumlah mebel yang diadakan	17 Unit		8 Unit	8 Unit	100 %	18 Unit	18 Unit	
5.03.01.2.0 7.6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	5 Unit		4 Unit	8 Unit	100%	31 Unit	31 Unit	
5.03.01.2.0 8	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%		100 %	101 %	101 %	100%	91%	
5.03.01.2.0 8.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan	2000 Surat	100%	1500 Surat	2289 Surat	114,45%	2000 Surat	1902 Surat	
5.03.01.2.0 8.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya	Jumlah rekening telepon, listrik dan air	36 Rekening	97,22%	36 Rekening	33 Rekening	91,67%	36 Rekening	28 Rekening	



	air dan listrik	yang terbayarkan								
5.03.01.2.0 8.4	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	8 Orang		8 Orang	8 Orang	100%	8 Orang	8 Orang	
5.03.01.2.0 9	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik	100%		100 %	102%	100%	100 %	100%	
5.03.01.2.0 9.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Jabatan yang dipelihara dan terbayarkan Pajaknya	2 Unit		1 Unit	3 Unit	100%	4 Unit	4 Unit	
5.03.01.2.0 9.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	3 Unit		3 Unit	3 Unit	100%	4 Unit	4 Unit	
5.03.01.2.0 9.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	55 Unit		61 Unit	64 Unit	104,92%	45 Unit	45 Unit	

5.03.01.2.0 9.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	1 Unit	
5.03.02	<b>PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH</b>									
5.03.02.2.0 1	<b>Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN</b>	Persentase informasi pegawai yang responsif gender	95%		95 %	100%	105%	95%	100%	
5.03.02.2.0 1.2	Penyusunan rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN dan PPPK	Jumlah rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN yang disusun	3720 Formasi		-	-	-	4820 Formasi	4820 Formasi	
5.03.02.2.0 1.3	Koordinasi dan fasilitasi pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Usulan Calon PNS dan PPPK yang akan diterima	800 Orang		1092 Orang	857 Orang	78,48%	1042 Orang	875 Orang	
5.03.02.2.0 1.6	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Persentase Pelayanan Pemberhentian ASN tepat waktu	100 Persen		100 Persen	63 Orang	126%	75%	87%	
5.03.02.2.0 1.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Sistem Informasi kepegawaian yang	5 Aplikasi		5 Aplikasi	3950 Orang	100%	5 Aplikasi	5 Aplikasi	

		dikelola (Aplikasi)								
5.03.02.2.0 1.11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah ASN yang diolah data kepegawaiannya melalui My SAPK	100 Persen		100%	96%	96%	-	-	
5.03.02.2.0 2	<b>Mutasi dan Promosi ASN</b>	Persentase rata-rata capaian pengelolaan Mutasi dan Promosi ASN	95%		90%	132%	146%	95%	93%	
5.03.02.2.0 2.1	Pengelolaan Mutasi ASN	Rasio Pegawai Fungsional (PNS tidak masuk Guru dan Tenaga Kesehatan)	70,98 Persen		16,65 %	713 Orang	203,71%	34%	30%	
5.03.02.2.0 2.2	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Persentase SK Kenaikan Pangkat ASN yang terbit	100 Persen	63%	100 Orang	735 Orang	94,11%	98%	93%	
5.03.02.2.0 2.3	Pengelolaan Promosi ASN	Persentase jumlah Pejabat ASN Daerah	97 Persen		90%	90%	100%	95%	90%	
5.03.02.2.0 3	<b>Pengembangan Kompetensi ASN</b>	Persentase rata-rata capaian pengembangan kompetensi ASN	95%		90%	143%	158%	95%	99%	
5.03.02.2.0 3.2	Pengelolaan Assesment Center	Jumlah pejabat struktural yang mengikuti Assessment	95 Persen		95%	43 Orang	143,33%	15%	16%	
5.03.02.2.0 3.4	Pengelolaan pendidikan lanjutan ASN	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan	39 Orang		-	-	-	34 Orang	33 Orang	

		lanjutan								
5.03.02.2.0 3.14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)	84,26 Orang		73,84 %	257 Orang	142,78%	65%	62%	
5.03.02.2.0 4	<b>Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</b>	<b>Persentase rata-rata capaian penilaian dan evaluasi kinerja aparatur</b>	95%		90 %	55%	61%	90%	63%	
5.03.02.2.0 4.2	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase Jumlah pegawai yang dinilai dan dievaluasi kinerjanya	100 Persen		100 %	3850 Orang	97,47%	100%	100%	
5.03.02.2.0 4.4	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Persentase jumlah piagam penghargaan pegawai yang terbit	100 Persen		100 %	291 Orang	100%	100%	94%	
5.03.02.2.0 4.7	Pembinaan Disiplin ASN	Persentase Jumlah kasus Disiplin ASN yang tertangani	100 Persen		100 %	49%	60,63%	95%	98%	
5.03.02.2.0 4.9	Pelayanan proses izin perceraian pegawai	Persentase jumlah permohonan proses izin perceraian pegawai	75 Persen		-	-	-	50%	53%	

		yang terlayani								
5.03.02.2.0 4.10	Evaluasi disiplin ASN	persentase pelanggaran disiplin ASN yang terselesaikan	100 Persen		-	-	-	80%	85%	
5.04.02	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>									
5.04.02.2.0 1	<b>Pengembangan Kompetensi Teknis</b>	Persentase Jumlah ASN yang lulus Pendidikan dan Pelatihan Kompetensi Teknis melalui BKPSDM	100%		95%	100%	105%	100%	100%	
5.04.02.2.0 1.3	Penyelenggaraan pengembangan kompetensi teknis umum, inti dan pilihan bagi jabatan administrasi penyelenggara urusan pemerintahan konkuren, perangkat daerah penunjang, dan urusan pemerintahan umum	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan yang diselenggarakan melalui BKPSDM	56 Orang		-			174 Orang	174 Orang	
5.04.02.2.0 1.4	Pembinaan, Pengordinasian, Fasilitasi,	Jumlah Diklat Kompetensi Teknis	3 Jenis		4 Jenis	125 Orang	100%	4 Jenis	4 Jenis	

	Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	umum, Inti, dan Pilihan yang dilaksanakan oleh BKPSDM								
5.04.02.2.0 2	<b>Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional</b>	<b>Persentase Jumlah ASN yang mengikuti Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional</b>	95%		95 %			95%	99%	
5.04.02.2.0 2.1	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan	Jumlah Kegiatan Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional yang dilaksanakan melalui BKPSDM Kab. Luwu Timur	4 Jenis		4 Jenis	7 Dokumen	100%	4 Jenis		

	Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan serta Jabatan Fungsional								
5.04.02.2.0 2.7	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, jabatan Pimpinan Tinggi, jabatan Fungsional, kepemimpinan dan Prajabatan	Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural (Persen)	93 Persen		89 %	170 Orang	100%	75%	74%

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan BKPSDM

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Luwu Timur juga telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) secara berjenjang, sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Indikator kinerja utama ditetapkan dengan memilih indikator-indikator kinerja dari sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dengan fokus pada perspektif stakeholder, sedangkan yang fokusnya pada internal bisnis proses (peningkatan kapasitas internal organisasi) tidak dijadikan sebagai Indikator Kinerja Utama.

Indikator Kinerja Utama BKPSDM Kabupaten Luwu Timur yang akan digunakan untuk periode waktu tahun 2021-2026 telah ditetapkan sesuai periode Renstra. Berdasarkan Renstra 2021 – 2026 , BKPSDM Kabupaten Luwu Timur mempunyai 3 (Tiga) Indikator dengan pencapaian kinerja yang dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.2.1**  
**Indikator Kinerja Utama (IKU) BKPSDM 2021-2026**

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Data Awal (2020)	Target Kinerja					Kondisi Akhir 2026
			2021	2022	2023	2024	2025	
Cakupan ASN yang tidak dijatuhi hukuman disiplin	%	99.85	99,88	99,90	99,95	99,99	100	100
Persentase sumber daya manusia aparatur yang mempunyai sertifikat kompetensi teknis, manajerial dan fungsional	%	79.13	80,61	81,82	82,10	83,50	85,00	85,00
Persentase Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	%	94	95	96	97	98	99	100

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sampai dengan Triwulan II 2022 sebagai berikut

1. Cakupan ASN yang tidak dijatuhi hukuman disiplin terealisasi sebesar 98,61%. Dari 4548 orang ASN Kabupaten Luwu Timur sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 terdapat 63 orang yang terjaring tidak disiplin kerja. Artinya terdapat 4485 orang ASN yang tidak dijatuhi hukuman disiplin. Sehingga capaian IKU 1 ini mencapai tercapai 98,70% dari target 99,90%.



2. Persentase Sumber Daya Manusia Aparatur yang bersertifikat Kompetensi Teknis, Manajerial dan fungsional terealisasi sebesar 39,58%. Jumlah ASN Kabupaten Luwu Timur pada Triwulan II Tahun 2022 sebanyak 4548 orang dan berdasarkan data yang diperoleh diketahui bahwa terdapat 1800 orang ASN yang telah memiliki sertifikat kompetensi teknis, manajerial dan Fungsional atau tercapai. Realisasi ini masih sangat jauh dari target dikarenakan sasaran target untuk IKU ini awalnya hanya mencakup PNS dan belum mencakup PPPK
3. Persentase Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/Kabupaten Kota terealisasi sampai dengan Triwulan II 2022 sebesar 87,64% dari target 96% atau dengan kata lain tercapai sebesar 91,92%.

Adapun Indikator Kinerja Kunci (IKK) untuk urusan Pendidikan dan Pelatihan sesuai Permendagri 86 Tahun 2017, disajikan pada Tabel berikut ini ;

**Tabel 2.2.2**  
**Indiator kinerja kunci (IKK) berdasarkan PERMENDAGRI 86 Tahun 2017**

Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Data Awal (2021)	Target Kinerja					Kondisi Akhir 2026
			2022	2023	2024	2025	2026	
Rata - rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	Jam	20 Jam	20 Jam	20 Jam	20 Jam	20 Jam	20 Jam	20 Jam
Persentase ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	%	3,26%	13,23%	20,49%	27,73%	34,88%	35,00%	35,00%
Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan structural	%	4,07%	10,55%	24,74%	38,82%	52,66%	53,00%	53,00%
Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintahan	Jabatan	33 Orang	35 Orang	35 Orang	35 Orang	35 Orang	35 Orang	35 Orang
Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintahan	Jabatan	787 Orang	750 Orang	700 Orang	700 Orang	600 Orang	500 Orang	500 Orang
Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	Orang	2800 Orang	3300 Orang	3450 Orang	3600 Orang	3750 Orang	3900 Orang	3900 Orang

**Tabel 2.2.3**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**  
**Kabupaten Luwu Timur**

No.	Indikator Kinerja Utama	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra BKPSDM				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021 (Thn n- 2)	Tahun 2022 (Thn n- 1)	Tahun 2023 (Thn n)	Tahun 2024 (Thn n+1)	Tahun 2021 (Thn n- 2)	Tahun 2022 (Thn n- 1)	Tahun 2023 (Thn n)	Tahun 2024 (Thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Persentase Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			95%	96%	97%	98%	92,37%		97%	98%	
2	Cakupan ASN yang tidak dijatuhi hukuman disiplin			99,88%	99,90%	99,95%	99,99%			99,95%	99,99%	
3	Persentase sumber daya manusia aparatur yang mempunyai sertifikat kompetensi teknis, manajerial dan fungsional			80,61%	81,82%	82,10%	83,50%			82,10%	83,50%	

Kedudukan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Luwu Timur merupakan perangkat daerah sebagai unsur penunjang dibidang pengelolaan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekertaris Daerah. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia bertugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang penempatan pegawai, perumusan dan pengembangan aparatur serta tugas pembantuan yang ditugaskan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 50 Tahun 2016, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Luwu Timur mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam memimpin dan melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kepegawaian. Untuk melaksanakan tugas tersebut, BKPSDM mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan pelaksanaan kebijakan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang perencanaan, evaluasi dan pengembangan kepegawaian;
- b. Perumusan pelaksanaan kebijakan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang mutasi dan data pegawai;
- c. Perumusan pelaksanaan kebijakan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan kesekretariatan yang menunjang tugas organisasi;
- d. Pelaksanaan administrasi badan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

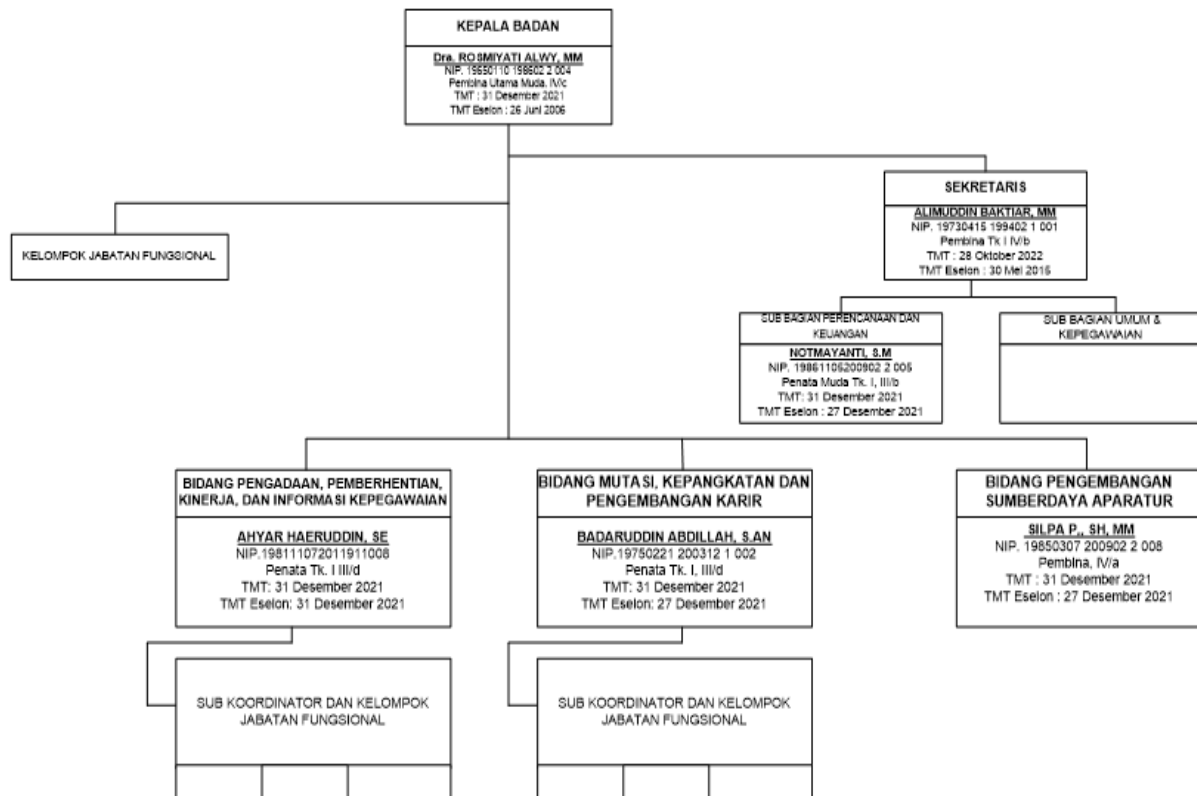
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Luwu Timur sebagai lembaga teknis daerah pada Pemerintah Kabupaten Luwu Timur memiliki struktur organisasi yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsinya Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Luwu Timur. Susunan organisasi tersebut terdiri dari:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, terdiri atas:
  1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan

- 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pengadaan, Pemberhentian, Kinerja, dan Informasi Kepegawaian, terdiri atas:
  - 1. Jabatan Fungsional Koord. Subbidang Pengadaan dan Pemberhentian;
  - 2. Jabatan Fungsional Koord. Subbidang Penilaian Kinerja dan Pembinaan Disiplin; dan
  - 3. Jabatan Fungsional Koord. Subbidang Data dan Informasi Kepegawaian.
- d. Bidang Mutasi, Kepangkatan, dan Pengembangan Karir, terdiri atas :
  - 1. Jabatan Fungsional Koord. Subbidang Mutasi dan Promosi;
  - 2. Jabatan Fungsional Koord. Subbidang Kepangkatan; dan
  - 3. Jabatan Fungsional Koord. Subbidang Pengembangan Karir.
- e. Bidang Pengembangan Sumber Daya Aparatur,
- f. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan struktur organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Luwu Timur dapat dilihat pada gambar berikut:

**Gambar 2.1**



Berjalannya organisasi BKPSDM sangat ditentukan oleh kuantitas dan kualitas sumber daya manusia. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya saat ini BKPSDM didukung oleh pegawai sebanyak 26 orang PNS dan 22 orang Tenaga Upah Jasa dengan profil demografi disajikan pada tabel 2.2.7; 2.2.8; 2.2.9 dan 2.2.10; dan 2.2.11

**Tabel 2.2.4**  
**Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan**

No.	Unit Kerja	Tingkat Pendidikan						Jumlah
		S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD	
1	Kepala Badan	1						1
2	Sekretariat	1	4		2			7
3	Bidang Pengembangan Sumber Daya Aparatur	1	2					3
4	Bidang Mutasi, Kepangkatan Dan Pengembangan Karir		6	1	1			8
5	Bidang Pengadaan, Pemberhentian Kinerja Dan Informasi Kepegawaian		7					7
6	Tenaga Fungsional							
<b>Jumlah</b>		<b>3</b>	<b>19</b>	<b>1</b>	<b>3</b>			<b>26</b>

**Tabel 2.2.5**  
**Jumlah Pegawai Non PNS Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan**

No.	Unit Kerja	Tingkat Pendidikan						Jumlah
		S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD	
1	Kepala Badan							
2	Sekretariat		4	1	4	1		
3	Bidang Pengembangan Sumber Daya Aparatur		3					
4	Bidang Mutasi, Kepangkatan Dan Pengembangan Karir		4					
5	Bidang Pengadaan, Pemberhentian Kinerja Dan Informasi Kepegawaian		6					
<b>Jumlah</b>								

**Tabel 2.2.6**  
**Jumlah Pegawai BKPSDM Berdasarkan Pangkat dan Golongan**

No.	Unit Kerja	Tingkat Pendidikan					Jumlah
		IV	III	II	I	PTT	
1	Kepala Badan	1					1
2	Sekretariat	1	4	2			7
3	Bidang Pengembangan Sumber Daya Aparatur		3				3
4	Bidang Mutasi, Kepangkatan Dan Pengembangan Karir		7	1			8
5	Bidang Pengadaan, Pemberhentian Kinerja Dan Informasi Kepegawaian		7				7
6	Tenaga Fungsional						
<b>Jumlah</b>		<b>2</b>	<b>21</b>	<b>3</b>			<b>26</b>

**Tabel 2.2.7**  
**Jumlah Pegawai BKPSDM Berdasarkan Jabatan Struktural**

No.	Unit Kerja	Tingkat Pendidikan						Jumlah
		II.b	III.a	III.b	IV.a	Staf PNS	Staf PTT	
1	Kepala Badan	1						
2	Sekretariat		1		1			
3	Bidang Pengembangan Sumber Daya Aparatur			1				
4	Bidang Mutasi, Kepangkatan Dan Pengembangan Karir			1				
5	Bidang Pengadaan, Pemberhentian Kinerja Dan Informasi Kepegawaian			1				
6	Tenaga Fungsional							
<b>Jumlah</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1</b>			<b>6</b>

**Tabel 2.2.8**  
**Jumlah Pegawai BKPSDM Berdasarkan Jabatan Fungsional**

No.	Unit Kerja	Tingkat Pendidikan						Jumlah
		III.a	III.b	III.c	III.d	Staf PNS	Staf PTT	
1	Kepala Badan							
2	Sekretariat							
3	Bidang Pengembangan Sumber Daya Aparatur							
4	Bidang Mutasi, Kepangkatan Dan Pengembangan Karir	1	1	2				4
5	Bidang Pengadaan, Pemberhentian Kinerja Dan Informasi Kepegawaian		1	1	2			4
6	Tenaga Fungsional							
<b>Jumlah</b>		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>2</b>			<b>8</b>

### 2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BKPSDM Kabupaten Luwu Timur

Berdasarkan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 50 Tahun 2020 pada pasal 4 Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Luwu Timur yaitu:

- a) **Tugas** Pokok Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Luwu Timur yaitu membantu Bupati dalam memimpin dan melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang menjadi Kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- b) **Fungsi** Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Luwu Timur:
  - a. Perumusan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengadaan, pemberhentian, kinerja dan informasi kepegawaian;
  - b. Perumusan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan, pembinaan dan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang mutasi, kepangkatan dan pengembangan karir;
  - c. Perumusan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan sumber daya aparatur;

- d. Pelayanan Administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada Badan;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BKPSDM sudah menjadi suatu hal yang sangat mendasar ketika dihadapkan dengan Isu-isu Strategis yang bersumber dari faktor eksternal maupun internal. Sehingga dianggap perlu untuk segera ditindak lanjuti dalam mencari solusi penyelesaiannya agar dapat segera dimanfaatkan secara optimal. Beberapa Permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian, Pengembangan Sumber Daya Manusia dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Adanya moratorium jabatan fungsional dan penyetaraan jabatan administrasi kedalam jabatan administrasi kedalam jabatan fungsional sehingga muncul beberapa masalah terkait jabatan fungsional;
2. Aparatur sipil negara ditengarai masih belum kompeten (incompetence) dalam menangani tugas dan fungsi di bidangnya khususnya pelayanan publik;
3. Aparatur sipil negara tidak terdistribusi berdasarkan kompetensi, keahlian dengan bidang tugas masing-masing (distribusi dan alokasi);
4. Aparatur Sipil Negara yang ada tidak berkualifikasi sesuai dengan kebutuhan tugas, fungsi jabatan yang diduduki (mismatch).
5. Aparatur Sipil Negara yang ada tidak terdayagunakan secara optimal (under employment).
6. Tidak tersedianya besetting pegawai seluruh OPD yang terupdate secara berkala.
7. Keterbatasan SDM pelayanan kepegawaian;
8. Berkurangnya jumlah pegawai setiap tahunnya karena pensiun;
9. Keterbatasan rekrutmen CPNS setiap tahunnya;
10. Data base kediklatan yang belum memadai;
11. Terbatasnya kuota pengembangan kompetensi bagi ASN setiap tahunnya;
12. Belum tersedianya data kebutuhan pengembangan kompetensi berdasarkan analisis kebutuhan diklat
13. Belum optimalnya implementasi undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
14. Belum optimalnya implementasi peraturan pemerintah Nomor: 53 Tahun 2010 tentang Aparatur sipil negara;
15. Masih kurangnya tingkat kedisiplinan Aparatur Sipil Negara;



16. Masih rendahnya pemahaman terhadap peraturan pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang penilaian prestasi kerja pegawai negeri sipil;
17. Masih rendahnya dukungan anggaran untuk meningkatkan kompetensi ASN melalui Pendidikan dan pelatihan teknis sesuai amanat peraturan pemerintah No 11 tahun 2009 tentang manajemen pegawai;
18. Adanya perubahan nomenklatur program dan kegiatan berdasarkan permendagri 90 tahun 2019 yang dimuktahirkan oleh kapmen 050-3708 Tahun 2020;
19. Penerimaan ASN (CPNS dan PPPK) adalah kewenangan pusat sehingga pelaksanaannya tetap mengacu pada jadwal yang ditetapkan oleh menpan.

Sebagaimana yang telah diuraikan bahwa keberadaan BKPSDM kabupaten Luwu Timur sebagai unsur penunjang pelaksana pemerintah kabupaten di bidang kepegawaian ASN daerah Kabupaten Luwu Timur, maka kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BKPSDM terdapat beberapa hal tantangan yang dihadapi BKPSDM dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD

Tentang yang dihadapi:

1. Rendahnya tingkat kapasitas dan kompetensi aparatur sipil negara
2. Kurangnya disiplin Aparatur Sipil Negara
3. Belum maksimalnya pelayanan kepegawaian
4. Minimnya kegiatan diklat teknis dan struktural yang dilaksanakan
5. Kurangnya kedarasan Aparatu Sipil Negara terhadap tugas dan tanggung jawabnya
6. Kurangnya partisipasi Aparatur Sipil Negara dalam melengkapi data kepegawaian
7. Anggaran yang terus mengalami penurunan setiap tahun

Peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD antara lain:

1. Meningkatkan sosialisasi tentang peraturan kepegawaian pada ASN;
2. Diterapkannya peraturan pemerintah tentang ASN;
3. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumberdaya aparatur sipil negara melalui Pendidikan dan pelatihan fungsional, teknis, dan pelatihan manajerial;
4. Terbukanya kesempatan mengikuti Pendidikan formal dan informal untuk meningkatkan kualitas SDM yang ada; dan
5. Mengoptimalkan sistem pengolahan data, akses dan informasi serta komunikasi jaringan elektronik untuk keperluan manajemen kepegawaian.

## 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berdasarkan Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada Badan Kepegawaian, Pengembangan dan Sumber Daya Manusia sebagaimana telah tertuang dalam Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023.

Rancangan Awal Renja Tahun 2023 Perangkat Daerah ini disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program tahun sebelumnya yang tentunya tetap berpedoman pada Dokumen Renstra (Rencana Strategis) yang telah direncanakan. Sehingga setiap sub kegiatan yang dituangkan ke dalam renja awal berdasarkan sub kegiatan yang ada di dalam Dokumen Renstra BKPSDM Tahun 2021-2026.

Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.4.1  
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023  
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia  
Kabupaten Luwu Timur

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kec. Malili, Kab. Luwu Timur	Persentase rata-rata kinerja pelayanan administrasi perkantoran	70	4,681,542,300	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kec. Malili, Kab. Luwu Timur	Persentase rata-rata kinerja pelayanan administrasi perkantoran	70	5,094,640,408	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Malili, Kab. Luwu Timur	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu dan termanfaatkan	100%	51,000,000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Malili, Kab. Luwu Timur	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu dan termanfaatkan	100%	104,018,000	

	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dokumen)	2.00	20,000,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dokumen)	2.00	31,892,000
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah dokumen RKA- SKPD yang disusun (Dokumen)	2.00	3,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah dokumen RKA- SKPD yang disusun (Dokumen)	2.00	8,735,000
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah dokumen DPA- SKPD yang disusun (Dokumen)	2.00	3,000,000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah dokumen DPA- SKPD yang disusun (Dokumen)	2.00	8,467,000
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah yang disusun (Dokumen)	10.00	25,000,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah yang disusun (Dokumen)	10.00	54,924,000
<b>2</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Kec. Malili, Kab. Luwu Timur</b>	<b>Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi keuangan perangkat daerah</b>	<b>100%</b>	<b>3,271,912,300</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Kec. Malili, Kab. Luwu Timur</b>	<b>Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi keuangan perangkat daerah</b>	<b>100%</b>	<b>3,318,373,891</b>
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan terbayarkan (Orang)	34.00	3,226,912,300	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan terbayarkan (Orang)	30.00	3,246,817,891
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD yang disusun (Dokumen)	7.00	45,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD yang disusun (Dokumen)	7.00	71,556,000
<b>3</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Kec. Malili, Kab. Luwu Timur</b>	<b>Persentase Laporan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu dan termanfaatkan</b>	<b>100%</b>	<b>10,000,000</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Kec. Malili, Kab. Luwu Timur</b>	<b>Persentase Laporan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu dan termanfaatkan</b>	<b>100%</b>	<b>9,484,360</b>

	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD yang disusun (Dokumen)	1.00	10,000,000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD yang disusun (Dokumen)	1.00	9,484,360
<b>4</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Kec. Malili, Kab. Luwu Timur</b>	<b>Persentase Data dan Informasi Pegawai Perangkat Daerah yang diadministrasikan</b>	<b>100%</b>	<b>120,850,000</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Kec. Malili, Kab. Luwu Timur</b>	<b>Persentase Data dan Informasi Pegawai Perangkat Daerah yang diadministrasikan</b>	<b>100%</b>	<b>160,230,000</b>
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah laporan data administrasi kepegawaian yang dimuktahirkan (Laporan)	1.00	15,000,000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah laporan data administrasi kepegawaian yang dimuktahirkan (Laporan)	1.00	14,500,000
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah ASN yang Lulus Diklat berdasarkan TUSI (Orang)	5.00	38,350,000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah ASN yang Lulus Diklat berdasarkan TUSI (Orang)	5.00	59,360,000
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan (orang)	4.00	37,500,000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan (orang)	4.00	27,410,000
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan (Orang)	5.00	30,000,000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan (Orang)	7.00	58,960,000
<b>5</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Kec. Malili, Kab. Luwu Timur</b>	<b>Persentase kebutuhan umum perangkat daerah yang terpenuhi</b>	<b>100%</b>	<b>345,400,000</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Kec. Malili, Kab. Luwu Timur</b>	<b>Persentase kebutuhan umum perangkat daerah yang terpenuhi</b>	<b>100%</b>	<b>363,856,450</b>

	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang di sediakan (jenis)	7.00	10,200,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang di sediakan (jenis)	7.00	10,199,300	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan (Unit)	20 unit	30,000,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan (Unit)	20.00	30,105,890	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (jenis)	20 Jenis	10,000,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (jenis)	21.00	13,959,000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Barang cetakan dan/atau penggandaan yang diadakan (jenis)	3.00	21,000,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Barang cetakan dan/atau penggandaan yang diadakan (jenis)	3.00	23,095,000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (eksamplar)	48.00	5,200,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan		Jumlah Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (eksamplar)	48.00	5,100,000	
	Fasilitas Kunjungan Tamu		Jumlah tamu yang difasilitasi (Orang)	650.00	19,000,000	Fasilitas Kunjungan Tamu		Jumlah tamu yang difasilitasi (Orang)	623.00	20,445,000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diikuti (kali)	140.00	230,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diikuti (kali)	98.00	255,249,600	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah dokumen laporan hasil penatausahaan arsip dinamis pada SKPD (Dokumen)	1.00	20,000,000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah dokumen laporan hasil penatausahaan arsip dinamis pada SKPD (Dokumen)	1.00	5,702,660	

<b>6</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kec. Malili, Kab. Luwu Timur</b>	<b>Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diadakan</b>	<b>100%</b>	<b>590,000,000</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kec. Malili, Kab. Luwu Timur</b>	<b>Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diadakan</b>	<b>100%</b>	<b>744,515,000</b>
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah kendaraan dinas yang diadakan (Unit)	1.00	500,000,000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah kendaraan dinas yang diadakan (Unit)	1.00	500,400,000
	Pengadaan Mebel		Jumlah mebel yang diadakan (unit)	17.00	40,000,000	Pengadaan Mebel		Jumlah mebel yang diadakan (unit)	7.00	29,900,000
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan (Unit)	5.00	50,000,000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan (Unit)	13.00	214,215,000
<b>7</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kec. Malili, Kab. Luwu Timur</b>	<b>Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi</b>	<b>100%</b>	<b>211,880,000</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kec. Malili, Kab. Luwu Timur</b>	<b>Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi</b>	<b>100%</b>	<b>224,487,407</b>
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan (Surat)	2,000.00	35,000,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan (Surat)	2,000.00	35,367,407
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah rekening telepon, listrik dan air yang terbayarkan (Rekening)	36.00	50,880,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah rekening telepon, listrik dan air yang terbayarkan (Rekening)	36.00	51,120,000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang disediakan (Orang)	8.00	126,000,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang disediakan (Orang)	9.00	138,000,000
<b>8</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan</b>	<b>Kec. Malili, Kab. Luwu Timur</b>	<b>Persentase Barang milik daerah penunjang urusan</b>	<b>100%</b>	<b>80,500,000</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjan</b>	<b>Kec. Malili, Kab. Luwu Timur</b>	<b>Persentase Barang milik daerah penunjang urusan</b>	<b>100%</b>	<b>169,675,300</b>

	Pemerintah Daerah		pemerintah daerah yang dipelihara			g Urusan Pemerintah Daerah		pemerintah daerah yang dipelihara			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah kendaraan perorangan dinas atau jabatan yang dipelihara (unit)	2.00	25,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah kendaraan perorangan dinas atau jabatan yang dipelihara (unit)	3.00	55,300,000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya (Unit)	3.00	10,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya (Unit)	5.00	21,720,000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (Unit)	55.00	30,000,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (Unit)	55.00	36,580,000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/di rehabilitasi (Unit)	1.00	15,500,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/di rehabilitasi (Unit)	1.00	56,075,300	
<b>I</b>	<b>PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH</b>	<b>Kec. Malili, Kab. Luwu Timur</b>	<b>Persentase ASN yang memiliki data kepegawain yang akurat</b>	<b>100</b>	<b>5,404,244,000</b>	<b>PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH</b>	<b>Kec. Malili, Kab. Luwu Timur</b>	<b>Persentase ASN yang memiliki data kepegawain yang akurat</b>	<b>100</b>	<b>3,195,334,642</b>	
<b>1</b>	<b>Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawain ASN</b>	<b>Kec. Malili, Kab. Luwu Timur</b>	<b>Persentase ASN yang difasilitasi pengadaan, pemberhentian dan data</b>	<b>90%</b>	<b>960,000,000</b>	<b>Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawain ASN</b>	<b>Kec. Malili, Kab. Luwu Timur</b>	<b>Persentase ASN yang difasilitasi pengadaan, pemberhentian dan data</b>	<b>90%</b>	<b>999,520,975</b>	

			<b>kepegawaian</b>					<b>kepegawaian</b>			
	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN		Jumlah Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan Untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN yang disusun (Formasi)	3,720.00	200,000,000	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN		Jumlah Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan Untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN yang disusun (Formasi)	4,588.00	50,024,000	
	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK		Jumlah Calon CPNS dan PPPK yang akan diterima (Orang)	800.00	510,000,000	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK		Jumlah Calon CPNS dan PPPK yang akan diterima (Orang)	868.00	645,034,975	
	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian		Jumlah usulan pemberhentian ASN yang ditindaklanjuti (Orang)	100.00	100,000,000	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian		Jumlah usulan pemberhentian ASN yang ditindaklanjuti (Orang)	100.00	94,622,000	
	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian		Jumlah ASN yang dimutakhirkan data kepegawaian (Orang)	5.00	25,000,000	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian		Jumlah ASN yang dimutakhirkan data kepegawaian (Orang)	5.00	209,840,000	
	Pengelolaan Data Kepegawaian		Persentase Jumlah Data pegawai yang dimutakhirkan	100.00	125,000,000	Pengelolaan Data Kepegawaian		Persentase Jumlah Data pegawai yang dimutakhirkan	100.00	-	
<b>2</b>	<b>Mutasi dan Promosi ASN</b>	<b>Kec. Malili, Kab. Luwu Timur</b>	Persentase ASN yang di mutasi dan promosi	<b>90%</b>	<b>900,000,000</b>	<b>Mutasi dan Promosi ASN</b>	<b>Kec. Malili, Kab. Luwu Timur</b>	Persentase ASN yang di mutasi dan promosi	<b>90%</b>	<b>936,399,900</b>	
	Pengelolaan Mutasi ASN		Rasio Pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk Guru dan Tenaga Persen)	70,98	150,000,000	Pengelolaan Mutasi ASN		Jumlah ASN yang ditempatkan dalam jabatan struktural, pelaksana dan fungsional (Orang)	70.50	188,368,800	



	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN		Persentase SK Kenaikan Pangkat ASN yang terbit (Persen)	100.00	300,000,000	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN		Jumlah Kenaikan Pangkat PNS tepat waktu (Orang)	100.00	310,542,000	
	Pengelolaan Promosi ASN		Persentase Jumlah Pejabat ASN daerah (Persen)	97.00	450,000,000	Pengelolaan Promosi ASN		Persentase Jumlah Pejabat ASN daerah (Persen)	95.00	437,489,100	
<b>3</b>	<b>Pengembangan Kompetensi ASN</b>	<b>Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi</b>	<b>Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi</b>	<b>90%</b>	<b>3,253,744,000</b>	<b>Pengembangan Kompetensi ASN</b>	<b>Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi</b>	<b>Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi</b>	<b>90%</b>	<b>921,636,367</b>	
	Pengelolaan Assessment Center		Jumlah Pejabat Struktural yang mengikuti Assesment (Persen)	95.00	500,000,000	Pengelolaan Assessment Center		Jumlah Pejabat Struktural yang mengikuti Assesment (Orang)	95.00	443,282,100	
	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN		Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan Lanjutan (Orang)	39.00	2,692,744,000	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN		Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan Lanjutan (Orang)	7.00	417,744,867	
	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional		Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan) (Persen)	84.26	61,000,000	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional		Jumlah ASN yang diangkat dalam jabatan fungsional dan jabatan pelaksana (Orang)	80.99	60,609,400	
<b>4</b>	<b>Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</b>	<b>Persentase ASN yang mendapat penilaian dan evaluasi kinerja</b>	<b>Persentase ASN yang mendapat penilaian dan evaluasi kinerja</b>	<b>90%</b>	<b>290,500,000</b>	<b>Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</b>	<b>Persentase ASN yang mendapat penilaian dan evaluasi kinerja</b>	<b>Persentase ASN yang mendapat penilaian dan evaluasi kinerja</b>	<b>90%</b>	<b>337,777,400</b>	

	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		Persentase Jumlah Pegawai yang dinilai dan Evaluasi kinerjanya (Persen)	100.00	75,000,000	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		Jumlah ASN yang mendapat penilaian dan evaluasi kinerja (Orang)	100.00	82,165,000	
	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai		Persentase jumlah piagam penghargaan pegawai yang terbit (persen)	100.00	80,500,000	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai		Jumlah ASN yang menerima penghargaan (Orang)	100.00	83,693,400	
	Pembinaan Disiplin ASN		Persentase Jumlah Kasus Disiplin ASN yang tertangani (Persen)	100.00	10,000,000	Pembinaan Disiplin ASN		Jumlah kasus Disiplin ASN yang tertangani (Persentase)	100.00	72,567,000	
	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai		Persentase jumlah permohonan proses izin perceraian pegawai yang terlayani (persen)	75.00	45,000,000	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai		Persentase jumlah permohonan proses izin perceraian pegawai yang terlayani (persen)	75.00	41,095,000	
	Evaluasi Disiplin ASN		Persentase pelanggaran disiplin ASN yang terselesaikan (persen)	100.00	80,000,000	Evaluasi Disiplin ASN		Jumlah kasus Disiplin ASN yang tertangani (Persentase)	100.00	58,257,000	
<b>I I I</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>	<b>Kec. Malili, Kab. Luwu Timur</b>	<b>Persentase ASN yang lulus dan meningkatkan kapasitasnya dengan pengembangan kompetensi melalui diklat</b>	<b>100</b>	<b>2,460,700,000</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>	<b>Kec. Malili, Kab. Luwu Timur</b>	<b>Persentase ASN yang lulus dan meningkatkan kapasitasnya dengan pengembangan kompetensi melalui diklat</b>	<b>100</b>	<b>2,161,283,000</b>	
<b>1</b>	<b>Pengembangan Kompetensi Teknis</b>	<b>Kec. Malili, Kab. Luwu Timur</b>	<b>Persentase ASN yang dikembangkan kompetensinya</b>	<b>100%</b>	<b>1,251,600,000</b>	<b>Pengembangan Kompetensi Teknis</b>	<b>Kec. Malili, Kab. Luwu Timur</b>	<b>Persentase ASN yang dikembangkan kompetensinya</b>	<b>100%</b>	<b>1,044,570,000</b>	

	Penyelenggaraan, pengembangan Kompetensi teknis umum, Inti dan pilihan bagi jabatan Administrasi penyelenggara urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang dan urusan Pemerintahan Umum		Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan yang diselenggarakan akan melalui BKPSDM (Orang)	56.00	1,107,600,000	Penyelenggaraan, pengembangan Kompetensi teknis umum, Inti dan pilihan bagi jabatan Administrasi penyelenggara urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang dan urusan Pemerintahan Umum		Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan yang diselenggarakan akan melalui BKPSDM (Orang)	60.00	960,950,000	
	Pembinaan Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan bagi jabatan Administrasi Penyelenggara, Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang dan Urusan Pemerintahan Umum.		Jumlah Diklat Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan yang dilaksanakan oleh BKPSDM (Jenis)	3.00	144,000,000	Pembinaan Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan bagi jabatan Administrasi Penyelenggara, Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang dan Urusan Pemerintahan Umum.		Jumlah Diklat Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan yang dilaksanakan oleh BKPSDM (Jenis)	3.00	83,620,000	
2	<b>Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial</b>	<b>Kec. Malili, Kab. Luwu Timur</b>	<b>Persentase ASN yang tersertifikasi, dan dikembangkan Kompetensi,</b>	<b>95%</b>	<b>1,209,100,000</b>	<b>Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi</b>	<b>Kec. Malili, Kab. Luwu Timur</b>	<b>Persentase ASN yang tersertifikasi, dan dikembangkan Kompetensi,</b>	<b>95%</b>	<b>1,116,713,000</b>	

dan Fungsional		Manajerial dan Fungsional			Manajerial dan Fungsional		Manajerial dan Fungsional		
Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembangan Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Sertajabatan Fungsional		Jumlah Kegiatan Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional yang dilaksanakan melalui BKPSDM Kab. Luwu Timur (Jenis)	100.00	16,000,000	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembangan Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Sertajabatan Fungsional		Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembangan Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Sertajabatan Fungsional (Dokumen)	4.00	3,675,000
Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten / Kota		Jumlah Kegiatan Sertifikasi kompetensi yang diselenggarakan (Kali)	.00	-	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten / Kota		Jumlah ASN yang mengikuti sertifikasi dan tugas belajar (Orang)	.00	-
Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpi		Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Struktural (Persen)	93.00	1,193,100,000	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional,		Jumlah ASN yang mengikuti PKP, PKA, PKN, Pelatihan Dasar dan Kompetensi Fungsional (Orang)	90.00	1,113,038,000

	nan, dan Prajabatan				Kepemimpinan, dan Prajabatan				
<b>Jumlah</b>				<b>12,546,486, 300</b>	<b>Jumlah</b>				<b>10,451,258, 050</b>

## **BAB III**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja BKPSDM Kab. Luwu Timur**

Kebijakan Nasional mengarah kepada Reformasi Birokrasi secara sistemik yang mencakup perbaikan kelembagaan, ketatalaksanaan hingga sumber daya birokrasi yang meliputi berbagai level mulai dari struktur hingga pola pikir serta kultur birokrasi sebagaimana diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 2014. Program nasional yang dilaksanakan BKPSDM Kab. Luwu Timur yang termasuk dalam urusan wajib peningkatan profesionalisme aparatur pemerintah daerah sejalan dengan tujuan reformasi birokrasi yaitu melaksanakan pembangunan tata pemerintahan yang baik melalui kualitas SDM yang kemudian melahirkan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Sesuai dengan tugas BKPSDM Kab. Luwu Timur yaitu memimpin dan melaksanakan urusan pemerintahan bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia sumber daya manusia yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka salah satu yang menjadi tujuan dari rencana kerja BKPSDM Kab. Luwu Timur tahun 2023 selain meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan layanan urusan perangkat daerah juga meningkatnya kompetensi sumber daya manusia Aparatur. Untuk merealisasikan hal tersebut maka sangat perlu dilakukan kegiatan untuk mengembangkan kompetensi ASN karena pengembangan kompetensi ASN merupakan bagian penting dalam Reformasi Birokrasi yang berperan pada pembangunan bangsa.

Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi, BKPSDM menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun kedepan yakni :

#### **"Mewujudkan Sumber Daya Manusia Aparatur yang Berkualitas"**

Untuk memastikan pencapaian tujuan yang diharapkan seperti di atas, maka sasaran jangka menengah BKPSDM Kabupaten Luwu Timur di jabarkan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah;
2. Meningkatkan disiplin aparatur;
3. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur;

Untuk lebih jelasnya mengenai tujuan dan sasaran kerja BKPSDM Kab. Luwu Timur dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 3.1**  
**Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja BKPSDM Kab. Luwu Timur Tahun 2023**

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja (Persen)
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Layanan Urusan Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP BKPSDM	Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah	Persentase capaian kinerja program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	97
2	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur	Indeks Profesional ASN	1 Meningkatkan Disiplin Aparatur	1 Cakupan ASN yang tidak dijatuhi hukuman disiplin	99,95
			2 Meningkatkan Kompetensi Sumber Daya Manusia Aparatur	2 Persentase sumber daya manusia aparatur yang mempunyai sertifikat kompetensi teknis, manajerial dan fungsional	82,10

Dalam rangka melaksanakan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, BKPSDM Kabupaten Luwu Timur menyusun Rencana Kerja Tahun 2023 dengan 2 Rumusan yaitu Berdasarkan PERMENDAGRI 13 Tahun 2016 dan Berdasarkan Pemetaan PERMENDAGRI 90 Tahun 2019.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan BKPSDM Tahun 2023 Berdasarkan Permendagri 13 Tahun 2016 menguraikan dalam 3 (tiga) Program, 14 (empat belas) Kegiatan dan 48 Sub Kegiatan dengan Pagu Anggaran sebesar Rp10.451.258.080 ,- dengan uraian sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Rp5.094.640.408,-
2. Program Kepegawaian Daerah Rp3.195.334.642,-
3. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Rp2.161.283.000,-

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan BKPSDM Kab. Luwu Timur Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.2

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan BKPSDM Kab. Luwu Timur 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana
											Program	Keluaran Sub Kegiatan				Hasil Kegiatan	Tolak Ukur	
5							UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN											
5	3						KEPEGAWAIAN											
5	3	1					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA			Rp5.003.543.350				98	Rp4.960.174.000			
5	3	1	2.				Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi kinerja perangkat daerah			Rp134.483.300				100	Rp51.000.000			
5	3	1	2.	1	Penyusunan dokumen		Jumlah dokumen		Kab. Luwu	10 Dok		Rp31.957.300	Pendapatan		2 Dok	Rp20.000.000		



RENCANA KERJA (RENJA) 2023 BKPSDM

					perencanaan prangkat daerah		perencanaan yang disusun tepat waktu		Timur, Malili, Puncak Indah				Asli Daerah (PAD)				
5	3	1	2.01	2	Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah dokumen RKA SKPD yang disusun tepat waktu		Kab. Luwu Timur, Malili, Puncak Indah		2 Dokumen	Rp 8,735,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2 Dok	Rp3.000.000
5	3	1	2.01	4	Kordinasi dan penyusunan DPA-SKPD		Jumlah dokumen DPA SKPD yang disusun tepat waktu		Kab. Luwu Timur, Malili, Puncak Indah		2 Dokumen	Rp 8.467.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2 Dok	Rp3.000.000
5	3	1	2.01	7	Evaluasi kinerja prangkat daerah		Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu		Kab. Luwu Timur, Malili, Puncak Indah		14 Dokumen	Rp 85.324.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			10 Dok	Rp25.000.000
<b>5</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2.</b>		<b>Administrasi keuangan perangkat daerah</b>								<b>Rp 3.222.066.</b>			<b>95</b>	<b>Rp3.916,62</b>

			<b>02</b>									450					<b>4,000</b>	
5	3	1	2.	1	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN		Jumlah ASN yang gaji dan tunjangannya terbayarkan		Kab. Luwu Timur, Malili, Puncak Indah		28 Orang		Rp 3.120.190.450	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			35 Orang	Rp3.871,624,000
5	3	1	2.	7	Kordinasi dan penyusunan laporan keuangan Bulanan/triwulan/semesteran SKPD		Jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu		Kab. Luwu Timur, Malili, Puncak Indah		5 Dokumen		Rp101.876.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			7 Dok	Rp45,000,000
<b>5</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2.</b>		<b>Administrasi barang milik daerah pada prangkat daerah</b>							<b>Rp11.289.000</b>				<b>100</b>	<b>Rp10,000,000</b>	
5	3	1	2.	6	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD		Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah SKPD yang disusun tepat waktu		Kab. Luwu Timur, Malili, Puncak Indah		1 Dokumen		Rp11.289.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1 Dok	Rp10,000,000
<b>5</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2.</b>		<b>Administrasi kepegawaian perangkat daerah</b>							<b>Rp138.410.000</b>				<b>100</b>	<b>Rp170,850,000</b>	

RENCANA KERJA (RENJA) 2023 BKPSDM

5	3	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya yang diadakan (Stel)								Pendapatan Asli Daerah (PAD)			55 Stel	Rp50,000,000
5	3	1	2.05	3	Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian				Kab. Luwu Timur, Malili, Puncak Indah	1 Laporan		Rp2.503.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1 Lap	Rp15,000,000
5	3	1	2.05	9	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan			Kab. Luwu Timur, Malili, Puncak Indah	7 Orang		Rp 54.320.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			5 Orang	Rp38,350,000
5	3	1	2.05	10	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan			Kab. Luwu Timur, Malili, Puncak Indah	4 Orang		Rp27.587.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			4 Orang	Rp37,500,000

RENCANA KERJA (RENJA) 2023 BKPSDM

5	3	1	2.05	1	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncak Indah	7 Orang	Rp 54.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	5 Orang	Rp30,000,00
5	3	1	2.06	<b>Administrasi umum prangkat daerah</b>					Rp369.872.600		95	Rp358,300,000
5	3	1	2.06	1	Penyediaan komponen instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen listrik/penerangan bangunan kantor/yang disediakan	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncak Indah	11 Jenis	Rp 10,198.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	7 Jenis	Rp11,000,00
5	3	1	2.06	2	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncak Indah	13 Jenis	Rp21.703.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	20 Unit	Rp30,000,00
5	3	1	2.06	4	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	Kab. Luwu Timur,	22 Jenis	Rp13.595.000	Pendapatan Asli	20 Unit	Rp10,000,00

RENCANA KERJA (RENJA) 2023 BKPSDM

									Malili, Punca k Indah					Daerah (PAD)				
5	3	1	2. 06	5	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan		Jumlah barang cetak dan pengadaan yang disediakan		Kab. Luwu Timur, Malili, Punca k Indah		3 Jenis		Rp 22.950.00 0	Pendap atan Asli Daerah (PAD)			3 Jenis	Rp22,000,0 00
5	3	1	2. 06	6	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan		Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan yang disediakan		Kab. Luwu Timur, Malili, Punca k Indah		48 Eksam plar		Rp 5.040.000	Pendap atan Asli Daerah (PAD)			48 Eksam plar	Rp5,300,00 0
5	3	1	2. 06	8	Fasilitasi kunjungan tamu		Jumlah tamu yang difasilitasi kunjungannya		Kab. Luwu Timur, Malili, Punca k Indah		693 Orang		Rp 20.445.00 0	Pendap atan Asli Daerah (PAD)			650 Orang	Rp20,000,0 00
5	3	1	2. 06	9	Penyelenggaraan rapat koordinasi		Jumlah rapat koordinasi dan		Kab. Luwu		218 Kali		Rp263.399 .600	Pendap atan			140 Kali	Rp240,000, 000

					dan konsultasi SKPD		kosultasi SKPD yang diselenggarakan		Timur, Malili, Puncak Indah				Asli Daerah (PAD)					
5	3	1	2.06	1	Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD				Kab. Luwu Timur, Malili, Puncak Indah		4 Dokumen		Rp5.578.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1 Dokumen	Rp20,000,000
<b>5</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2.07</b>		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>							<b>Rp743.915.000</b>				<b>100</b>	<b>Rp140,000,000</b>	
5	3	1	2.07	1	Pengadaan kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				Kab. Luwu Timur, Malili, Puncak Indah		1 Unit		Rp 500.000.000				-	-
5	3	1	2.07	5	Pengadaan mebel		Jumlah mebel yang diadakan		Kab. Luwu Timur, Malili, Puncak Indah		8 Unit		Rp 34.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			18 Unit	Rp50,000,000

RENCANA KERJA (RENJA) 2023 BKPSDM

									Indah										
5	3	1	2.	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan		Kab. Luwu Timur, Malili, Puncak Indah		11 Unit		Rp 209.915.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			5 Unit	Rp50,000,000		
5	3	1	2.	1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan (Unit)		Kab. Luwu Timur, Malili, Puncak Indah					Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1 Unit	Rp40,000,000		
5	3	1	2.		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>												100	Rp211,900,000	
			08									Rp 232.589.000							
5	3	1	2.	1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan		Kab. Luwu Timur, Malili, Puncak Indah		2000 Surat		Rp 38.369.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2000 Surat	Rp35,000,000		
5	3	1	2.	2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air	Jumlah rekening telepon, listrik		Kab. Luwu Timur,		36 Rekening		Rp 68.220.000	Pendapatan Asli			36 Rekening	Rp50,900,000		

					dan listrik		dan air yang terbayarkan		Malili, Punca k Indah				Daerah (PAD)				
5	3	1	2. 08	4	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor		Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan			8 Orang		Rp 126.000.0 00	Pendap atan Asli Daerah (PAD)		8 Orang	Rp126,000, 000	
<b>5</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2. 09</b>		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>										<b>100</b>	<b>Rp101,500, 000</b>	
5	3	1	2. 09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Jabatan yang dipelihara dan terbayarkan Pajaknya		Kab. Luwu Timur, Malili, Punca k Indah	4 Unit		Rp 55,300,00 0	Pendap atan Asli Daerah (PAD)		2 Unit	Rp30,000,0 00	
5	3	1	2. 09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau		Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya		Kab. Luwu Timur, Malili, Punca k Indah	4 Unit		Rp 21.720.00 0	Pendap atan Asli Daerah (PAD)		3 Unit	Rp10,000,0 00	



RENCANA KERJA (RENJA) 2023 BKPSDM

					Lapangan														
5	3	1	2.	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara		Kab. Luwu Timur, Malili, Puncak Indah		73 Unit		Rp 36.580.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			55 Unit	Rp.31,500,000		
5	3	1	2.	1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi		Kab. Luwu Timur, Malili, Puncak Indah		1 Unit		Rp 37.318.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1 Unit	Rp30,000,000		
5	3	2			<b>Program Kepegawaian Daerah</b>											98	Rp3,455,000,000		
5	3	2	2.		<b>Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN</b>												95	Rp1,040,000,000	
5	3	2	2.	2	Penyusunan rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN dan PPPK	Jumlah rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN yang disusun		Kab. Luwu Timur, Malili, Puncak Indah		4876 Formasi		Rp 88.011.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2920 Formasi	Rp250,000,000		

RENCANA KERJA (RENJA) 2023 BKPSDM

5	3	2	2.	3	Koordinasi dan fasilitasi pengadaan PNS dan PPPK		Jumlah Usulan Calon PNS dan PPPK yang akan diterima		Kab. Luwu Timur, Malili, Puncak Indah		946 Orang		Rp643.339.900	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			700 orang	Rp520,000,000
5	3	2	2.	6	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian		Jumlah Pelayanan Pemberhentian ASN tepat waktu		Kab. Luwu Timur, Malili, Puncak Indah		78 Orang		Rp80.692.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			100 Perse	Rp105,000,000
5	3	2	2.	1	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian		Jumlah Sistem Informasi kepegawaian yang dikelola (Aplikasi)		Kab. Luwu Timur, Malili, Puncak Indah		6 Aplikasi		Rp129.840.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			5 Aplikasi	Rp40,000,000
5	3	2	2.		<b>Mutasi dan Promosi ASN</b>								Rp 936.398.000				95 Perse	Rp850,000,000
5	3	2	2.	1	Pengelolaan Mutasi ASN		Rasio Pegawai Fungsional (PNS tidak masuk		Kab. Luwu Timur,		35 Perse		Rp 188,367,000	Pendapatan Asli			78 Perse	Rp150,000,000

						Guru dan Tenaga Kesehatan)		Malili, Puncak Indah					Daerah (PAD)				
5	3	2	2.02	2	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Persentase SK Kenaikan Pangkat ASN yang terbit		Kab. Luwu Timur, Malili, Puncak Indah		98 Persen		Rp 310.542.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			100 Persen	Rp300,000,000
5	3	2	2.02	3	Pengelolaan Promosi ASN	Persentase jumlah Pejabat ASN Daerah		Kab. Luwu Timur, Malili, Puncak Indah		95 Persen		Rp 437.489.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			98 Persen	Rp400,000,000
5	3	2	2.03		<b>Pengembangan Kompetensi ASN</b>											95	Rp1,260,000,000
5	3	2	2.03	2	Pengelolaan Assesment Center	Jumlah pejabat struktural yang mengikuti Assessment		Kab. Luwu Timur, Malili, Puncak Indah		25 Persen		Rp630.378.100	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			95 Persen	Rp450,000,000

5	3	2	2.03	4	Pengelolaan pendidikan lanjutan ASN		Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan lanjutan		Kab. Luwu Timur, Malili, Puncak Indah		8 Orang		Rp648.770.700	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			10 Orang	Rp710,000,000
5	3	2	2.03	14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional		Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)		Kab. Luwu Timur, Malili, Puncak Indah		80.99 Perse		Rp82.218.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			87,53 Perse	Rp100,000,000
5	3	2	2.04		<b>Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</b>							Rp384.784.000				95	Rp305,000,000	
5	3	2	2.04	2	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		Persentase Jumlah pegawai yang dinilai dan dievaluasi kinerjanya		Kab. Luwu Timur, Malili, Puncak Indah		100 Perse		Rp105.735.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			100 Perse	Rp80,000,000
5	3	2	2.04	4	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi		Persentase jumlah piagam penghargaan		Kab. Luwu Timur,		100 Perse		Rp115.238.000	Pendapatan Asli			100 Perse	Rp85,000,000

RENCANA KERJA (RENJA) 2023 BKPSDM

					Pegawai		pegawai yang terbit		Malili, Puncak Indah				Daerah (PAD)				
5	3	2	2.04	7	Pembinaan Disiplin ASN		Persentase Jumlah kasus Disiplin ASN yang tertangani		Kab. Luwu Timur, Malili, Puncak Indah		95 Persen		Rp73.183.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100 Persen	Rp10,000,000
5	3	2	2.04	9	Pelayanan proses izin perceraian pegawai		Persentase jumlah permohonan proses izin perceraian pegawai yang terlayani		Kab. Luwu Timur, Malili, Puncak Indah		75 Persen		Rp27.365.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		75 Persen	Rp45,000,000
5	3	2	2.04	10	Evaluasi disiplin ASN		persentase pelanggaran disiplin ASN yang terselesaikan		Kab. Luwu Timur, Malili, Puncak Indah		85 Persen		Rp63.263.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100 Persen	Rp85,000,000
5	3	3			<b>Program Pengembangan Sumber Daya Manusia</b>								Rp2.173.283.000			40	Rp3,808,480,000

5	4	2	2.01	<b>Pengembangan Kompetensi Teknis</b>							Rp1.066.732.500				100	Rp2,297,300,000
5	4	2	2.01	3	Penyelenggaraan pengembangan kompetensi teknis umum, inti dan pilihan bagi jabatan administrasi penyelenggara urusan pemerintahan konkuren, perangkat daerah penunjang, dan urusan pemerintahan umum	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan yang diselenggarakan melalui BKPSDM		Kab. Luwu Timur, Malili, Puncak Indah		130 Orang	Rp852.922.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			345 Orang	Rp2,184,800,000
5	4	2	2.01	4	Pembinaan, Pengordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan	Jumlah Diklat Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan yang dilaksanakan oleh BKPSDM		Kab. Luwu Timur, Malili, Puncak Indah		3 Jenis	Rp213.810.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			6 Jenis	Rp112,500,000

					pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum												
5	4	2	2.	02	<b>Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional</b>						Rp 858,793,8 00				95	Rp1,511,18 0,000	
5	4	2	2.	02	1	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar,	Jumlah Kegiatan Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional yang dilaksanakan melalui BKPSDM Kab. Luwu Timur		Kab. Luwu Timur, Malili, Punca k Indah		4 Doku men		Rp17.786. 000	Pendap atan Asli Daerah (PAD)		4 Jenis	Rp20,000,0 00

					Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan serta Jabatan Fungsional												
5	4	2	2.	7	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, jabatan Pimpinan Tinggi, jabatan Fungsional, kepemimpinan dan Prajabatan	Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural (Persen)		Kab. Luwu Timur, Malili, Punca k Indah		75 Perse n		Rp1.088.7 64.500	Pendap atan Asli Daerah (PAD)			96 Perse n	Rp1,391,18 0,000
<b>TOTAL</b>											Rp 10.801.25 8.050			Rp12,223,6 54,000			



## **BAB IV PENUTUP**

Rencana Kerja disusun agar pelaksanaan program dan kegiatan lebih terkoordinasi, terintegrasi, dan sinergis untuk pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi BKPSDM Kabupaten Luwu Timur secara efektif dan efisien dengan memperhatikan dan mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya yaitu RPJMN, RPJMD Provinsi, RKPD Provinsi, RPJPD Kabupaten, RPJMD Kabupaten, RKPD Kabupaten dan Renstra SKPD. Renja tersebut selanjutnya dijadikan sebagai bahan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan APBD tahun 2023.

Dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan pada Rencana Kerja Tahun 2023 sangat dibutuhkan dukungan dan kerjasama yang baik dari berbagai pihak begitupun dukungan dari segi penganggaran karena tanpa anggaran yang cukup tentunya akan ada beberapa kegiatan termasuk program nasional yang akan tertunda atau tidak dapat dilaksanakan yang berakibat tidak optimalnya capaian kinerja BKPSDM.

Dalam pelaksanaan Renja BKPSDM Kab. Luwu Timur Tahun 2023 tetap memperhatikan kaidah-kaidah pelaksanaan seperti hasil evaluasi capaian kinerja tahun lalu, masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan, tujuan dan sasaran yang akan dicapai serta keberlanjutan dan konsistensi pembangunan.

Adapun rencana tindak lanjut dalam penyusunan Renja BKPSDM Tahun 2023 yaitu dalam menetapkan dokumen perencanaan harus tepat waktu atau mengacu pada jadwal yang telah ditetapkan dan sesuai amanat peraturan yang berlaku, melakukan evaluasi target kinerja dan anggaran tahun sebelumnya sebagai bahan selanjutnya, perlu peningkatan kapasitas SDM aparatur perencana melalui pendidikan formal, bimtek, pelatihan serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur perencana.

Kami menyadari penyusunan renja ini masih jauh dari kesempurnaan sehingga saran, kritikan konstruktif sangat kami butuhkan. Semoga Allah SWT senantiasa memberi Rahmat, Hidayah dan kekuatan untuk bekerja secara ikhlas, cermat, tuntas dan profesional sehingga menuntun kita kejalan kebenaran. Aamiin.

Malili, Juli 2022

**KEPALA BKPSDM,**



**Dra. ROSMIYATI ALWY, MM**

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. 19650110 1986202 2 004